



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	11
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 12 November 2019
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	Pembahasan Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018
Ketua Rapat	:	Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. 43 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Plt. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Sestama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Plt. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibuka pukul 14.10 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

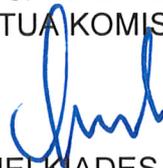
1. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan kinerja dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk terus mengoptimalkan penyerapan anggaran tahunan serta merencanakan proyeksi penanganan masalah bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk membuat roadmap perlindungan PMI serta meningkatkan tenaga terampil dan profesional di negara penempatan dalam rangka meningkatkan remitansi.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk menyesuaikan anggaran program dan kegiatan terhadap pembentukan Badan baru sebagaimana amanat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan sinergitas data PMI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan PMI di negara penempatan.
6. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga agar mampu menciptakan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian.
7. Komisi IX DPR RI mengagendakan Kunjungan Kerja Spesifik mengenai Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke daerah-daerah potensi Pekerja Migran Indonesia.
8. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, paling lambat tanggal 21 Nopember 2019.

III. PENUTUP

Rapat diakhiri pukul 19.45 WIB.

Jakarta, 12 November 2019

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



EMANUEL MELKADES LAKA LENA
A-331